



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit Bhayangkara Blora sebagai rumah sakit yang baru diresmikan pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, khususnya terkait implementasi teknologi sistem informasi dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Sebagai rumah sakit yang masih dalam tahap pengembangan sistem operasional, kebutuhan akan teknologi informasi kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung pelayanan, administrasi, serta pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien (Biantara & Mulyanti, 2023; Suhadi & Ashaeryanto, 2023)

Berdasarkan kondisi operasional yang ada, penerapan sistem informasi di rumah sakit ini belum berjalan optimal. Beberapa proses pelayanan dan administrasi masih berjalan secara manual atau belum sepenuhnya terintegrasi antar unit layanan, sehingga menyebabkan proses pencatatan data, pelaporan, serta koordinasi antar unit belum sepenuhnya efisien. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan bahwa keterbatasan integrasi sistem masih menjadi masalah umum pada rumah sakit di daerah berkembang (Santoso et al., 2023).

Permasalahan implementasi teknologi sistem informasi dan manajemen SDM di rumah sakit ini dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama, yaitu masalah SDM, implementasi manajemen dan sistem informasi, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasional rumah sakit (Madanchian, 2025; Malahayati & Syamsuar, 2023).

Kendala utama dalam penerapan teknologi informasi di rumah sakit adalah kesiapan SDM dalam menggunakan sistem digital. Tidak semua tenaga kesehatan dan tenaga administrasi memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem informasi yang tersedia. Pelatihan penggunaan sistem informasi belum sepenuhnya merata sehingga masih ditemukan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual menuju sistem digital (Bayhaqi et al., 2025; Ummah, 2019).

Tabel 1.1. Fluktuasi Kendala Infrastruktur Sistem Informasi Dan Beban Kerja Administratif SDM Semester II Tahun 2025

Bulan	Down time Server/ Jaringan (Kali)	Gagal Bridging antar Instalasi	Komplain Kelambatan Sistem (Laporan)	Kesalahan Input Data Medis/ Billing (Kasus)	Permintaan Bantuan Teknis (Laporan)	Staf Melakukan Double Entry Manual (Orang)
Juli	6	32	14	10	11	12
Agustus	9	35	11	15	21	15
September	5	18	10	5	17	9
Oktober	7	25	16	15	18	17
November	4	22	15	13	20	20
Desember	8	25	8	10	15	14

Sumber: RS. Bhayangkara Blora, 2025

Beban kerja administratif yang masih tinggi akibat sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan tenaga kesehatan harus melakukan input data berulang, sehingga waktu pelayanan kepada pasien menjadi kurang optimal. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi digital tenaga kesehatan menjadi faktor utama hambatan digitalisasi layanan kesehatan (Bhattacharyya et al., 2021).

Implementasi teknologi sistem informasi di rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial. Pada praktiknya, integrasi sistem antar unit pelayanan, administrasi, dan manajemen masih belum optimal

(Nascimento et al., 2023; Keshvari et al., 2018).

Proses administrasi masih berjalan secara manual atau belum terhubung secara otomatis antar unit, sehingga menimbulkan potensi keterlambatan pelaporan, duplikasi pencatatan data, serta kurang optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan manajemen. Infrastruktur teknologi yang masih dalam tahap pengembangan juga mempengaruhi stabilitas penggunaan sistem di beberapa unit pelayanan (Schiffelers et al., 2025; Tanasiichuk et al., 2023).

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan implementasi teknologi informasi di rumah sakit umumnya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kesiapan SDM, serta tingginya biaya implementasi dan pemeliharaan system (Santosa et al., 2023; M. Zhao et al., 2022).

Implementasi teknologi informasi kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, terutama terkait standar rekam medis elektronik, integrasi data kesehatan nasional, serta regulasi perlindungan data pasien. Kebijakan digitalisasi kesehatan yang terus berkembang menuntut rumah sakit untuk menyesuaikan sistem informasi yang digunakan (Varela et al., 2023; Yang et al., 2025).

Rumah sakit dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan regulasi tersebut. Ketidaksiapan infrastruktur, kebutuhan investasi teknologi yang besar, serta keterbatasan tenaga teknis menyebabkan proses adaptasi kebijakan digitalisasi berjalan tidak optimal. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa

perubahan kebijakan dan kurangnya kesiapan fasilitas kesehatan menjadi hambatan utama transformasi digital di sektor kesehatan (Hossain et al., 2025).

Berbagai penelitian telah mengkaji hambatan implementasi teknologi sistem informasi di rumah sakit dari berbagai perspektif. Layli Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa kendala utama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan kesiapan tenaga kesehatan, sedangkan Rambe et al. (2025) menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, terutama kompetensi dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 bertujuan meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun implementasinya masih menghadapi kendala organisasi dan integrasi sistem (Kemkes RI, 2022).

Kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan aspek teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah secara simultan dalam memengaruhi kinerja operasional rumah sakit, khususnya pada rumah sakit yang sedang berkembang di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji keterkaitan ketiga aspek tersebut secara komprehensif.

Kajian empiris yang menguji secara kuantitatif pengaruh implementasi sistem informasi dan manajemen SDM terhadap kinerja operasional rumah sakit dalam konteks kebijakan pemerintah masih terbatas (Biantara & Dety Mulyanti, 2023; Santosa et al., 2023). Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi implementasi teknologi

sistem informasi dan manajemen SDM di Rumah Sakit Bhayangkara Blora serta bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi operasional rumah sakit.

1.2. Kajian Masalah

Kajian masalah dalam penelitian ini didasarkan pada *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menjelaskan penerimaan teknologi, DeLone and McLean *Information System Success Model* untuk menilai keberhasilan sistem informasi, teori Human Capital untuk mengkaji kualitas sumber daya manusia, serta konsep kebijakan publik dalam memahami peran regulasi pemerintah. Berdasarkan kerangka tersebut, permasalahan implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Bhayangkara Blora dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kesiapan internal dan dukungan kebijakan eksternal, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya kualitas human capital yang berdampak pada efisiensi operasional dan risiko kesalahan data medis. Secara umum pendekatan yang digunakan terintegrasi antara aspek teknologi, human capital, dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja operasional rumah sakit (Bhattacharyya et al., 2021; Khan et al., 2025; Wang et al., 2023).

Kebijakan publik yang belum konsisten, seperti keterbatasan insentif fiskal dan kendala interoperabilitas program Satu Sehat, turut memperlambat implementasi SIMRS, terutama bagi rumah sakit baru dengan biaya awal tinggi dan dukungan Dana Alokasi Khusus terbatas. Faktor teknologi dan kebijakan, sumber daya manusia (SDM) menjadi determinan penting keberhasilan SIMRS. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi rumah sakit

sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan SDM, teknologi yang tersedia, dan dukungan kebijakan pemerintah (Harikatang et al., 2024; Rambe et al., 2025; Santosa et al., 2023).

Apabila masalah ini tidak segera diatasi, konsekuensinya meliputi penurunan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, meningkatnya disparitas digital antara rumah sakit kota dan daerah, serta pemborosan anggaran hingga 15% dari total belanja operasional rumah sakit, yang menghambat tercapainya tujuan transformasi digital kesehatan nasional. Masalah utama penelitian bersumber dari interaksi yang belum sinergis antara implementasi SIMRS, manajemen SDM, dan kebijakan pemerintah, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-korelasional untuk memberikan gambaran faktual dan rekomendasi kebijakan yang relevan (Hakim et al., 2025; Kemkes RI, 2023; Marbella et al., 2024; Sugiyono, 2020).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap penerapan teknologi sistem informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Blora?
- 1.3.2. Bagaimana pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap penerapan teknologi sistem informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Blora?
- 1.3.3. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pemerintah dan

manajemen sumber daya manusia secara simultan terhadap penerapan teknologi sistem informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Blora?

1.3.4. Bagaimana rekomendasi strategi manajerial yang tepat untuk mengoptimalkan tata kelola Teknologi Sistem Informasi berbasis implementasi kebijakan pemerintah dan manajemen sumber daya di Rumah Sakit Bhayangkara Blora?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah dan manajemen sumber daya manusia terhadap penerapan teknologi sistem informasi.

1.4.2. Tujuan Khusus

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap penerapan teknologi sistem informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Blora.
- 2) Menganalisis pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap penerapan teknologi sistem informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Blora.
- 3) Menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah dan manajemen sumber daya manusia secara simultan terhadap penerapan teknologi sistem informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Blora.

- 4) Merumuskan rekomendasi strategi manajerial dan mengoptimalkan tata kelola Teknologi Sistem Informasi, mulai dari aspek operasionalisasi sistem, berbasis implementasi kebijakan pemerintah dan manajemen sumber daya di Rumah Sakit Bhayangkara Blora.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang manajemen rumah sakit, khususnya terkait implementasi Teknologi Sistem Informasi (TSI) dan manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam konteks kebijakan pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi layanan kesehatan serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

1.5.2. Manfaat Praktis

1) Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini membantu rumah sakit mengidentifikasi hambatan dalam penerapan Teknologi Sistem Informasi (TSI) dan pengelolaan SDM, sehingga dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan layanan kesehatan serta kesiapan teknologi dan kompetensi SDM.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan data empiris untuk mendukung perumusan kebijakan digitalisasi layanan kesehatan, termasuk regulasi, insentif, dan infrastruktur, serta membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

3) Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini memperkaya wawasan akademisi dalam mengkaji faktor keberhasilan implementasi TSI dan manajemen SDM di rumah sakit serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan solusi praktis di sektor kesehatan.

